BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Sampah merupakan limbah yang dihasilkan dari adanya aktivitas manusia.Jumlah atau *volume* sampah sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap barang atau material yang gunakan sehari-hari, sehingga pengelolaan sampah tidak terlepas dari pengelolaan gaya hidup masyarakat. Sampai saat ini permasalahan sampah belum tertangani dengan baik terutama di perkotaan.Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan.

Peningkatan produksi sampah telah menimbulkan masalah pada lingkungan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk perkotaan. Sementara, lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah juga makin terbatas. Kondisi ini makinmemburuk manakala pengelolaan sampah di masing-masing daerah masih kurang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan serta tidak terkoordinasi dengan baik.

3.1.1 Keadaan Geografis Wilayah Kota Bandung

Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga Bandung merupakan suatu cekungan (Bandung Basin), di bagian Selatan permukaan tanah

relative datar, sedangkan di wilayah Kota Bandung bagian Utara berbukit-bukit. Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 Meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 Meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 Meter di atas permukaan laut.Adapun batas-batas administratif Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang Kabupaten BandungBarat.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Pasteur Kecamatan CimahiUtara, Cimahi Selatan dan Kota Cimahi.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dayeuh Kolot, Bojongsoang,Kabupaten Bandung.

3.1.2 Gambaran Balai Pengelolaan Sampah Regional Di Kota Bandung

Sampah merupakan sebagai sesuatu benda yang dihasilkan dari berbagai benda yang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi oleh manusia. Sampah regional mempunyai kecenderungan yang bersifat lintas di Kabupaten/Kota yang memerlukan penanganan khusus dalam perencanaan, pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan, penanganan, pemrosesan akhir, pengembangan serta pengawasan. Untuk penanganan persampahan sebagaimana dimaksud di atas dan sambil menunggu penetapan peraturan perundang-undangan tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk Pusat Pengelolaan Persampahan Jawa Barat.

Maka pada tahun 2008 dibentuk suatu lembaga pengelolaan sampah regional yang diprakarsai oleh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu lembaga Pusat Pengelolaan Persampahan Jawa Barat (P3JB). P3JB dibentuk melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2007. Berdasarkan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2009 bentuk kelembagaan P3JB mengalami peningkatan Kelembagaan menjadi UPTD Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Jawa Barat. BPSR Jawa Barat adalah sebuah unit pelaksana teknis dinas di bawah naungan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 113 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

3.1.3 Lokasi dan Metode Operasi TPA Sampah di Kota Bandung

Pengelolaan sampah pada tahap akhir di kota dan kabupaten di Bandung umumnya menerapkan metode penimbunan akhir (*Final Disposal*). Hampir setiap kota dan kabupaten memiliki satu lokasi TPA. Berdasarkan perolehan data, dari seluruh TPA aktif di Bandung hanya 4% yang dioperasikan secara *sanitary*

landfill, 31% secara *controlled landfill* dan selebihnya yaitu 61% dioperasikan secara *open dumping*.

Tabel 3.1
TPA Sampah di Kota Bandung

No	Kota / Kabupaten	Nama TPA	Luas Lahan (Ha)	Metode Operasional	Status
1	Kab. Bandung	Leuwigajah	5,5	*Open dumping*	Tidak aktif
		Sarimukti	18,3	*Open dumping*	Aktif
		Leuwigajah	17,5	*Open dumping*	Tidak aktif
2	Kota Bandung	Jelekong	10	*Controlled landfill*	Tidak aktif
		Pasit Impun	8	*Controlled landfill*	Tidak aktif
		Leuwigajah	1	*Open dumping*	Tidak aktif

Sumber: (junjunbandung, 2012)

Dari data di atas, terlihat bahwa hampir semua TPA Bandung Area menerapkan metode penimbunan (*open dumping)*. Metode *open dumping* adalah rendahnya biaya operasi yang harus dikeluarkan, mengingat metode ini tidak memerlukan perlakuan khusus yang berdampak pada penambahan biaya operasi. Alasan utama diselenggarakannya *open dumping* walaupun sudah diketahui bahwa metode ini telah menimbulkan pencemaran terhadap air tanah, namun dampaknya metode ini masih menjadi pilihan pengelola kota. Namun demikian, satu hal yang luput adalah pencemaran terjadi tidak pernah diperhitungkan biaya yang seharusnya ditanggung pemerintah. Disebutnya *controlled landfill* dan atau *sanitary landfill* sebagai metode yang diterapkan pada sebuah TPA, sesungguhnya perlu dicermati. Banyak kota yang telah merencanakan pelaksanaan metode

tersebut, namun dalam pelaksanaannya banyak ditemui TPA hanya dioperasikan oleh seorang sopir bulldozer, atau hanya mengandalkan sopir truk sampah untuk menuang sampahnya. Jarang ditemukan adanya perencanaan penimbunan yang sistematis agar TPA dapat berfungsi dengan baik dan tidak mengganggu lingkungan. Kontrol terhadap operasi penimbunan sampah di TPA Kota Bandung masih sangat lemah. Tidak jarang dijumpai bahwa suatu TPA Sampah kota juga menerima buangan industri atau bahkan golongan limbah B3 misalnya limbah *infectious* dari aktifitas rumah sakit. Hal ini tentunya akan mendatangkan dampak yang tidak diinginkan. Umumnya terjadi di Kota Bandung bahwa TPA yang telah dipersiapkan untuk dioperasikan dengan metode *sanitary landfill* akhirnya berubah menjadi *open dumping*. Faktor penyebeb utama adalah kurangnya konsistensi pihak pengelola menerapkan aturan-aturan yang telah diterapkan dalam perencanaan.Jumlah timbulan sampah di Kota Bandung dihitung berdasarkan banyaknya jumlah penduduk dikali timbulan sampah tiap orang tiap hari.

Jumlah penduduk Kota Bandung tahun 2012 sebanyak kurang lebih 5.160.000 jiwa dan mengacu pada SNI. 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman, timbulan sampah per hari sebanyak 3 liter sedangkan berat jenis sampah campuran mencapai 350 kg/ m3 sehingga sampah campuran yang dihasilkan di Kota Bandung diperkirakan mencapai 8.320 m3 tiap harinya atau 2080 ton/ hari. Adapun komposisi sampah di Kota Bandung dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Komposisi Sampah Di Kota Bandung

No	Komponen	% Berat	Berat (Ton/Hari)
1	Sampah Basah	65	1352
2	Kertas	11	228,8
3	Tekstil	2	41,6
4	Plastik	13	270,4
5	Pecah Belah	2	41,6
6	Logam	1	20,8
7	Lain-lain	6	124,8
Jumlah		**100**	**2080**

(Sumber:Balai Pengelolaan Sampah Regional Kota Bandung, 2012)

Sedangkan pengangkutan sampah yang menumpuk terjadi di empat lokasi tempat pembuangan sampah. Volume sampah dari 4 TPS itu diperkirakan mencapai 348 ton. Masih ada 12 TPS lainnya yang menunggu giliran.Dari 164 TPS tersebar di Bandung, hanya 16 TPS yang saat ini terjadi sampah menggunung.Saat ini sampah diangkut dari 4 TPS yang masing-masing di Jalan Lodaya, Jalan Ambon, Pasar Cijerah, dan Pasar Ujungberung,saat meninjau pengangkutan sampah menutup sebagaian badan jalan di TPS Lodaya, Jalan Lodaya, Kota Bandung,Berdasarkan jumlah tonase sampah, dari keempat TPS tersebut yang paling besar di TPS Lodaya.

Saat ini sampah diangkut di TPS Lodaya diperkirakan mencapai bobot 156 ton. Dalam keadaan normal, sampah TPS Lodaya bisa diangkut truk sebanyak dua kali bolak balik atau dua rit. Sedangkan saat ini mencapai 26 rit dengan mengerahkan 20 armada truk sampah. Kapasitas satu truk itu mengangkut enam ton. Untuk volume sampah di TPS Lodaya, sama dengan 26 dikalikan enam ton,

itu jumlahnya. Di TPS Pasar Cijerah dan Pasar Ujungberung, truk disiapkan mengangkut sampah sebanyak 10 rit. Jika 20 rit dikalikan enam ton di dua TPS itu jumlah sampah diangkut seberat 120 ton. Untuk TPS di Jalan Ambon, truk siap 12 rit melakukan pengangkutan.Jika 12 rit kali enam tonberarti volume sampah di TPS Jalan Ambon itu beratnya 72 ton.Sampah-sampah dari empat TPS itu akan dikirim ke tempat pembuangan akhir (TPA) Sarimukti. Sampah menggunung di Kota Bandung disebabkan kendaraan alat berat di TPA Sarimukti mengalami kerusakan. Sehingga,sampah menumpuk di TPS dan pinggir jalan. Sampai saat ini sudah berangsur sampah mulai diangkut ke TPA Sarimukti.Jika di sejumlah TPS terjadi penumpukan sampah itu terjadi karena akumulasi dari jumlah sampah yang sempat tidak terangkut beberapa hari ke belakang. (Sumber: detikBandung, 2012).

3.1.4 Konsep Pengelolaan Sampah Regional di Kota Bandung

Konsep *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) merupakan suatu pendekatan dalam mengelola sampah yang dimulai dari sumbernya dengan memegang konsep minimasi. Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R bertujuan mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir melalui pengembangan upaya memperlakukan sampah dengan cara mengganti, pengurangan, penggunaan-kembali dan daur-ulang. Konsep 3R bukan merupakan konsep baru dalam pengelolaan sampah, namun pelaksanaannya selalu mengalami hambatan. Pelaksanaan 3R pada skala rumah tangga memerlukan pendekatan yang tepat karena rumah tangga merupakan kelompok yang sulit untuk diberi dorongan (insentif), teguran, bahkan ancaman. Namun pada sisi lainnya, pendekatan 3R

dalam skala rumah tangga memiliki peluang yang cukup besar guna membentuk pola pikir masyarakat.

Berdasarkan konsep pengelolaan sampah, terdapat 2 kelompok utama pengelolaan sampah,yaitu:

1. Pengurangan sampah (*waste minimization*), yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah R1),guna-ulang (R2) dan daur-ulang (R3)
2. Penanganan sampah (*waste handling*), yang terdiri dari:
    a. Pemilahan: dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah,dan/atau sifat sampah
    b. Pengumpulan: dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ketempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu
    c. Pengangkutan: dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempatpenampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir
    d. Pengolahan: dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah
    e. Pemrosesan akhir sampah: dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasilpengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Dalam hal ini Badan pengelolaan sampah regional menekankan bahwa prioritas utama yang harus dilakukan oleh semua fihak adalahbagaimana agar mengurangi sampah semaksimal mungkin. Bagian sampah atau residu dari kegiatanpengurangan sampah yang masih tersisa selanjutnya dilakukan

pengolahan (*treatment*) maupunpengurugan (*landfilling*). Pengurangan sampah melalui 3R diantaranya:

1. Pembatasan (*reduce*): mengupayakan agar limbah yang dihasilkan sesedikit mungkin
2. Guna-ulang (*reuse*): bila sampah akhirnya terbentuk, maka upayakan memanfaatkan limbah tersebutsecara langsung.
3. Daur-ulang (*recycle*): residu atau limbah yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secaralangsung, kemudian diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan bakumaupun sebagai sumber energi.

Ketiga pendekatan tersebut merupakan dasar utama dalam pengelolaan sampah, yang mempunyaisasaran utama minimasisampah yang harus dikelola dengan berbagai upaya agar limbah yang akan dilepas ke lingkungan, baik melaui tahapan pengolahan maupun melalui tahan pengurugan terlebih dahulu, akan menjadi sesedikit mungkin dan dengan tingkat bahaya sesedikit mungkin.

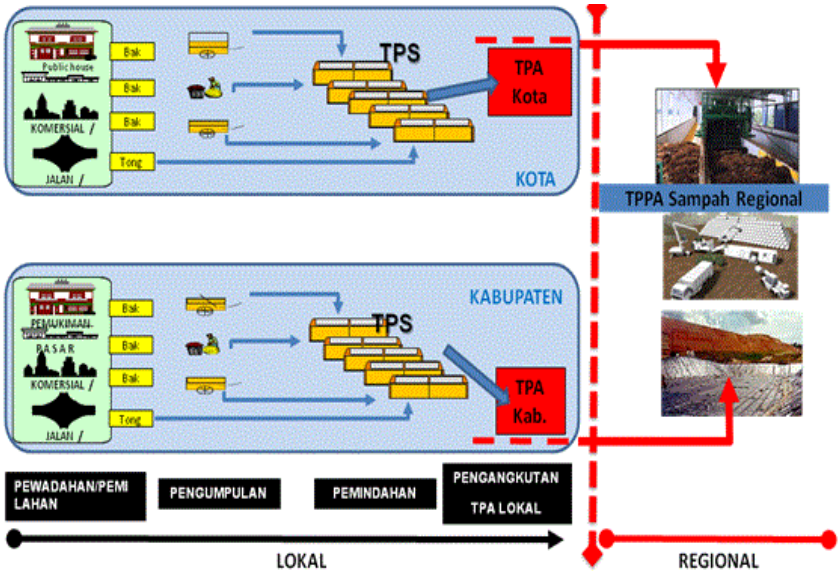
Konsep pembatasan (*reduce*) jumlah sampah yang akan terbentuk dapat dilakukan antara lain melalui:

1. Efisiensi penggunaan sumber daya alam.
2. Rancangan produk yang mengarah pada penggunaan bahan atau proses yang lebih sedikitmenghasilkan sampah, dan sampahnya mudah untuk diguna-ulang dan didaur-ulnag.
3. Menggunakan bahan yang berasal dari hasil daur-ulang sampah.
4. Mengurangi penggunaan bahan berbahaya.

Konsep daur-ulang (recycle) mengandung pengertian pemanfaatan semaksimal mungkin residu melalui proses, baik sebagaibahan baku untuk produk sejenis seperti asalnya, atau sebagai bahan baku untuk produk yang berbeda,atau memanfaatkan enersi yang dihasilkan dari proses recycling tersebut.

Konsep guna-ulang (*reuse*) mengandung pengertian bukan saja mengupayakan penggunaan residu atausampah terbentuk secara langsung, tetapi juga upaya yang sebetulnya biasa diterapkan sehari-hari pada masyarakat Kota Bandung, yaitu memperbaiki barang ynag rusak agar dapat dimanfaatkan kembali. Bagi prosdusen, memproduksi produk yang mempunyai masa-layan panjang sangat diharapkan. Konsep daur-ulang (recycle) mengandung pengertian pemanfaatan semaksimal mungkin residu melalui proses, baik sebagai bahan baku untuk produk sejenis seperti asalnya, atau sebagai bahan baku untuk produk yang berbeda, atau memanfaatkan energi yang dihasilkan dari proses recycling tersebut.

Gambar 3.1
Komponen Kegiatan Pengelolaan Sampah Regional



(Sumber: Balai Pengelolaan Sampah Regional Kota Bandung, 2012)

3.1.5 Visi dan Misi Balai Pengelolaan Sampah Regional di Kota Bandung

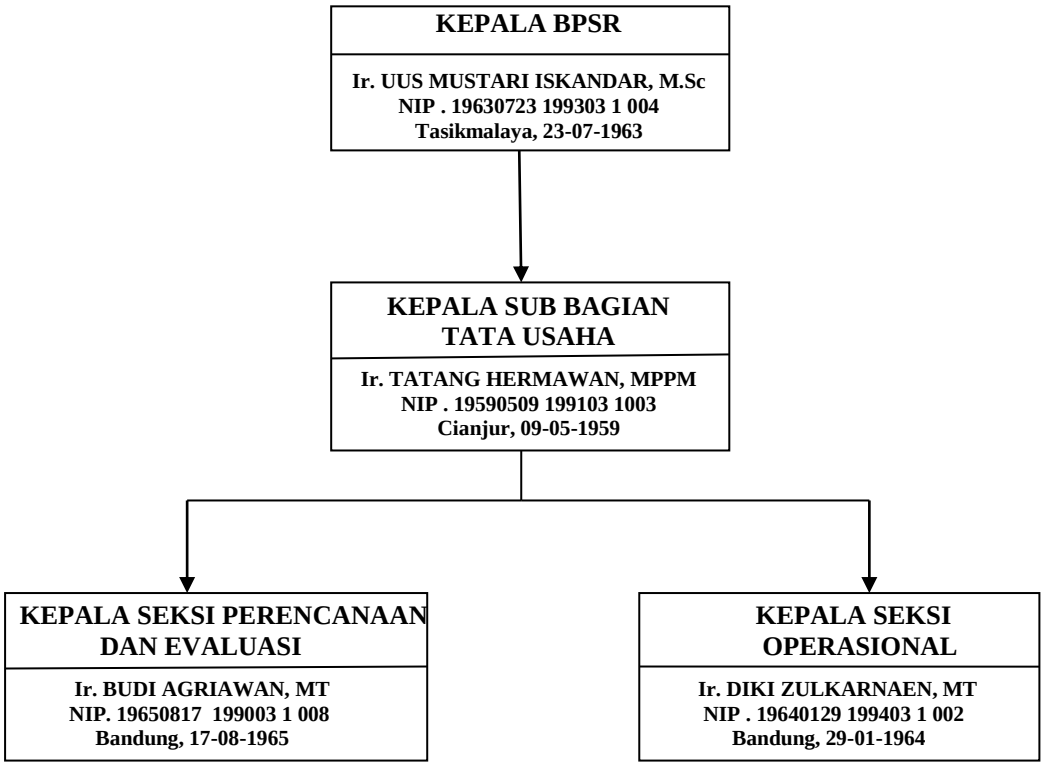
a. Visi Balai Pengelolaan Sampah Regional adalah ”Terwujudnya Penyelenggaraan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Jawa Barat yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan mandiri pada tahun 2015”.

b. Misi Balai Pengelolaan Sampah Regional adalah:

1) Meningkatkan sistem teknologi dan operasional pengelolaan tempat pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah berskala regional.
2) Mengembangkan kelembagaan dan organisasi yang optimal didukung dengan sumber daya manusia yang professional.
3) Mengembangkan sistem kemandirian dalam pembiayaan pengelolaan sampah yang mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan TPPAS regional secara optimal.
4) Mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat, kerjasama dan kemitraan swasta dalam pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah.
5) Mengembangkan perangkat peraturan sebagai landasan yang kuat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

3.1.6 Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR)

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Sampah Regional Kota Bandung



(Sumber: Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2012)

3.1.7 Tugas Balai Pengelolaan Sampah Regional di Kota Bandung

Tugas dan wewenang pada Balai Pengelolaan Sampah Regional tentang pengelolaan sampah yang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;

c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah regional;
e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di Daerah untuk mengurangi dan menangani sampah;
g. melakukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dengan lembaga Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :

a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
b. memfasilitasi kerjasama antardaerah, kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat serta jejaring dalam pengelolaan sampah regional.
c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah.
d. menyelenggarakan operasional TPPAS Regional meliputi pengolahan dan pemrosesan melalui kerjasama antardaerah.

e. menetapkan lembaga penyelenggara pengelolaan sampah regional.
f. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sampah, mengacu pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
g. memberikan izin penyelenggaraan pengelolaan sampah regional;
h. memberikan bantuan teknis dan pembinaan pengelolaan sampah regional.
i. meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggara pengelolaan sampah regional.
j. menyusun rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan regional.
k. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota.
l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di Daerah.

3.1.8 Rekapitulasi Jumlah Peagawai Balai Pengelolaan Sampah Regional di Kota Bandung

1. PNS : 7 Orang
   a. Kepala Balai : 1 Orang
   b. Sub Bagian Tata Usaha : 2 Orang
   c. Perencanaan dan Evaluasi : 2 Orang
   d. Seksi Oprasional : 2 Orang
2. Non PNS (OB) : 48 Orang

a. Kantor Pusat : 30 Orang

1. Sub Bagian Tata Usaha : 13 Orang

2. Perencanaan dan Evaluasi : 7 Orang

3. Seski Oprasional : 10 Orang

b. Sub unit Pelayanan TPK Sarimukti : 18 Orang

1. Kepala : 1 Orang

2. Koordinator Penataan dan Pengaturan : 5 Orang

3. Koordinator Pengolahan dan Pemanfaatan : 3 Orang

4. Koordinator Umum dan Pemberdayaan : 7 Orang

5. Koordinator Kerjasama dan Kemitraan : 2 Orang

3. Non PNS (OH) : 56 Orang

a. TPK Sarimukti : 51 Orang

1. Operator Alat Berat : 8 Orang

2. Mekanik : 4 Orang

3. Pencatat : 3 Orang

4. Petugas Keamanan : 6 Orang

5. Penjaga Kebersihan : 9 Orang

6. Operator Komposting : 21 Orang

b. TPPAS Legok Nangka : 2 Orang

1. Petugas Keamanan : 2 Orang

c. TPPAS Leuwigajah : 3 Orang

1. Petugas Keamanan : 3 Orang

Jumlah : 111 Orang

Lebih jelasnya daftar nominatif pegawai Balai Pengelolaan Sampah pada Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Daftar Nominatif Pegawai BPSR

No	Nama	Nip/ Golongan	Jabatan Sekarang
1	Ir. Uus Mustari Iskandar, M. Sc	19630723 199303 1 004 Pembina / IV a	Kepala Balai Pengelolaan Sampah Regional
2	Ir. Tatang Hermawan, MPPM	19590509 199103 1 003 Pembina / IV a	Kasubag. Tata Usaha BPSR Jawa Barat
3	Ir. Diki Zulkarnain, MT	19640129 199403 1 002 Pembina / IV a	Kasi. Operasional BPSR Jawa Barat
4	Budi Agriawan, ST. MT	19650817 199003 1 008 Penata Tk. I / III	Kasi. Perencanaan dan Evaluasi BPSR Jawa Barat
5	Srie Daniarti, SE. MM	196105191986032005 Penata / III c	Kordinator BPSR
6	Arief Perdana, ST	19751017 201001 1 009 Penata Muda / III a	Pelaksana Perencanaan dan Evaluasi
7	Raden Yuliati Rahayu, ST	19770725 201001 2 004 III/a- CPNS	Pelaksana Perencanaan dan Evaluasi
8	Al Hijaf Farabi D. Y. S. IP	-	Staff Pelaksana Oprasional
9	Agus Usman, ST	-	Staff Pelaksana Oprasional
10	Cynthia Chrisna S, S. PT	-	Staff Pelaksana Oprasional
11	Rd. Agung Setiawan WK, ST	-	Staff Pelaksana Oprasional
12	Deri Benarli N, SE	-	Staff Pelaksana Oprasional
13	Riki Fajar Hafrisa S. Kom	-	Staff Pelaksana Oprasional
14	Zely Ahmad Yanwar, A. Md	-	Staff Pelaksana Oprasional
15	Rany Widyawati	-	Staff Pelaksana Oprasional
16	Arif Rahman Mudiantoro	-	Staff Pelaksana Oprasional
17	Adam Husein	-	Staff Pelaksana Oprasional
18	Feri Setiadi, SST	-	Staff Pelaksana dan Evaluasi
19	Tiara Egamadya R, ST	-	Staff Pelaksana dan Evaluasi
20	Rama Ramdhani, ST	-	Staff Pelaksana dan Evaluasi

21	Sigit Triyono, A, Md	-	Staff Pelaksana dan Evaluasi
22	Erma Yudiana	-	Staff Pelaksana dan Evaluasi
23	Nina Kurniawaty	-	Staff Pelaksana dan Evaluasi
24	Guntur Guntara Pratama	-	Staff Pelaksana dan Evaluasi
25	Iwan Syarifudin, BE	-	Kordinator TPK Sarimukti
26	Riswanto, St	-	Kordinator Urusan Penataan dan Pengaturan
27	Sutrisno	-	Staff Pelaksana Urusan Penataan dan Pengaturan
28	Dede Santoso	-	Staff Pelaksana Urusan Penataan dan Pengaturan
29	Tomy Sundara	-	Staff Pelaksana Urusan Penataan dan Pengaturan
30	Ikar Rayadi	-	Staff Pelaksana Urusan Penataan dan Pengaturan
31	Sony D. H. Utama,St	-	Kordinator Urusan Pengelolaan dan Pemanfaatan
32	Yana Kurnia	-	Staff Pelaksana Pengelolaan dan Pemanfaatan
33	Fery Mahdi, SE	-	Staff Pelaksana Pengelolaan dan Pemanfaatan
34	Sugeng Prayitno	-	Staff Pelaksanaan Umum dan Pemberdyaan

3.2 Metode Penelitian

Dalam pemecahan masalah yang ada suatu penelitian diperlukan penyelidikan yang hati-hati, teratur dan terus-menerus, sedangkan untuk mengetahui bagaimana seharusnya langkah penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu yang mengungkapkan gambaran masalah yang terjadi pada saat penelitian ini berlangsung yang tujuannya untuk memecahkan, menganalisis, dan mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh dan ditarik kesimpulan sehingga dapat memberikan gambaran serta informasi yang jelas mengenai objek yang diteliti.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan serta menginterpretasikan data yang telah terkumpul kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Yang bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta, objek, atau subjek apa adanya dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif kualitatif dapat diartikan yaitu peneliti mengumpulkan semua data di Dinas Permukiman dan Perumahan pada Balai Pengelolaan Sampah Regional.yang kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.Adapun Desain Penelitian yang digunakan peneiti dalam Penelitian iniadalah metode kualitatif.Peneliti mengumpulkan data-datadari hasil, observasi yang peneliti lihat dilapangan dan pengumpulan data-data yang peneliti peroleh, Data yang diperoleh dengan cara mempelajari “literatur”

tulisan dan kerangka ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti beserta hasil beberapa data dari para informan.

Dalam melakukan suatu penelitian perlu dilakukan perencanaan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Desain penelitian menurutSugiyono (2010:48)mengatakan bahwa:

"Desain penelitian adalah rancangan yang disusun efisien dan sistematis guna menguji hipotesis yang diajukan dan bertujuan mengambil kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian".

Dari definisi diatas maka dapat di simpukan desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh penelitidalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan yang diajukan dan bertujuan mengambil kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Studi Pustaka

Studi Pustaka yang peneliti lakukan dalam usulan penelitian ini yakni dengan cara membaca buku-buku yang memiliki muatan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, dan untuk menambah data yang peneliti perlukan, peneliti mencari dan mengkaji pengumpulan data-data dari sumber lain yang berhubungan dengan masalah, menbaca, dan mempelajari buku-buku untuk memperoleh data-data dari beberapa web-web diinternet yang berkait.

3.2.2.2 Studi Lapangan

Studi Lapangan yaitu teknikpengamatan dan penarian data secara langsung ke lapangan atau lokasi yang menjadi objek Penelitian dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi non partisipan, yakni teknik pengumpulan data dengan cara peneliti berada diluar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan peneliti dalam melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung.
2. Wawancara yaitu cara memperoleh informasi melaui komunikasi percakapan yang dilakukan saling berhadapan ataupun bisa melalui telepon. Peneliti mewawancarai aparatur yang berada di Dinas Permukiman dan Perumahan di Balai Pengelolaan Sampah Regional Provinsi Jawa Barat, dengan cara melakukan Tanya jawab kepada aparatur yang mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung.
3. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku-buku, majalah, Surat Kabar dan sebagainya. Metode ini dimaksudkan untuk mempelajari dan mengkaji secara mendalam data-data mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan *pertama* digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive,* yaitu sejumlah informan yang ditentukan berdasarkan pertimbangan sesuai dengan objek penelitian yaitu aparatur yang bersangkutan mengenai pengelolaan sampah regional di Kota Bandung. Adapun informan aparatur dalam penelitian inimeliputi :

1. Kepala Balai Pengelolaan Sampah Regional sebagai penanggung jawab pengelolaan sampah di Kota Bandung.
2. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi sebagai pembuat perencanaan dan evaluasi pengelolaan sampah regional di Kota Bandung.
3. Kepala Seksi Oprasional sebagai penyediaan prasarana dan sarana di Balai Pengelolaan Sampah Regional Kota Bandung.

Teknik penentuan informan yang *kedua* digunakan peneliti dalam menentukan informan masyarakat adalah *acciedental,* yaitu siapa saja masyarakat yang berada disekitar kawasan atau lingkungan di TPA Sarimukti tempat lokasi peneliti melakukan penelitian di saat peneliti berada dilokasi penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di wilyah TPA Sarimukti yang menjadi dampak negatif dikarenakan pencemaran polusi udara dan masyarakat yang menjadi pemulung dikarenakan menjadi penghasilan sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan ekonomi.

3.2.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Secara operasional teknik analisis data yang dilakukan mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian atau hubungan diantara bagian dalam keseluruhan. Peneliti dalam menganalisis data, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data terlebih dahulu sebelum di interprestasikan artinya data diproses terlebih dahulu, kemudian memberikan gambaran serta mendeskripsikan dan menganalisis sejumlah konsep yang berkenaan dengan Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung, setelah mendapatkan gambaran dari data yang telah peneliti kaji, maka peneliti menarik kesimpulan dari data tersebut dalam hal ini mengenai Implementasi kebijakan tentangpengelolaan sampah di Dinas Permukimandan Perumahan di Balai Pengelolaan Sampah Regional Provinsi Jawa Barat di wilayah Kota Bandung di bagian balai pengelolaan sampah regional.

Peneliti menggunakan analisis ini agar dapat mengklasifikasikan secara efektif dan efisien mengenai data-data yang terkumpul, sehingga siap untuk diinterpretasikan.

3.2.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat Usulan Penelitian adalah di kantor Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Jalan. Kawaluyaan No. 4 Bandung, Jawa Barat. Telp. 022-7319782 – 7319735 – 7319712, Kode Pos 40286 di Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR).

Tabel 3.4
Jadwal Kegiatan Penelitian

Waktu / Kegiatan	2012	2013							
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
Penyusunan Rancangan Judul									
Penyusunan Usulan Penelitian									
Seminar Usulan Penelitian									
Revisi Usulan Penelitian									
Penelitian di Lapangan									
Pengolahan Data									
Sidang Ujian Skripsi									